

PENULISAN HUKUM

**PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS WAKTU DALUWARSA DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU (STUDY KASUSUS DI
BAWASLU PROVINSI NTB)**

*Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

GEDE TEGUH M. PRAYITNA

201610110311076



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2020

**PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS WAKTU DALUWARSA DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU (STUDY KASUSUS DI
BAWASLU PROVINSI NTB)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Gede Teguh M Prayitna

201610110311076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2020

**PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS WAKTU DALUWARSA DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU (STUDY KASUS DI
BAWASLU PROVINSI NTB)**

Diajukan Oleh:

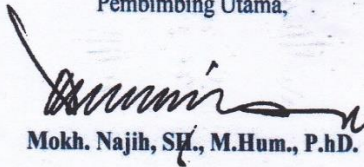
GEDE TEGUH M PRAYITNA

201610110311076

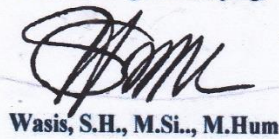
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 15 Juli 2020

Pembimbing Utama,

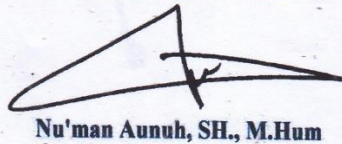

Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.

Pembimbing Pendamping,


Wasis, S.H., M.Si., M.Hum



Ketua Program Studi,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GEDE TEGUH M PRAYITNA

NIM : 201610110311076

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS WAKTU DALUWARSA DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU (STUDY KASUS DI
BAWASLU PROVINSI NTB)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Melang, 10 Agustus 2020



GEDE TEGUH M PRAYITNA

Abstraksi

Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, b) Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari Negara, c) Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, d) Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional. Penelitian adalah penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap asas hukum. Sumber data dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder (library research) yang berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilu. Dokumen tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan. Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tidak pemilu adalah; a) Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah), b) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD,

Calon Presiden dan Wakil Presiden). Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya)

Kata kunci : Hakikat, Tujuan Pemilu, Pidana Pemilu



Abstract

General Election is an order of the 1945 Constitution to implement the principle of people's sovereignty exercised every five years within the State of the Republic of Indonesia with the aim of: a) Establishing a People's Consultative Institution imbued with the spirit of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia, b) representatives of the people and the President and Vice President in continuing the struggle to defend and develop the objectives of the State, c) Elections is a means of implementing democracy to uphold the establishment of Pancasila and defend the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, d) To ensure the sustainability of the government five years and fill National development. Research is a normative juridical research that analyzes against the principle of law. The source of data in this study is to use the secondary data (library research) which derives some relevant legal material such as the Criminal Law Codes, Law Number 7 of 2017 and the PKPU Regulations related to the General Election. The document will be analyzed and then systematically arranged which is ultimately used as a conclusion material, so that it can answer the problem. The Criminal Act of General Election may be included in special crime, namely, criminal and electoral violations, both regulated in the Criminal Code (Penal Code) and regulated in Law Number 7 Year 2017 on General Election. The parties that may be subject to the election are not; a) Electoral Election (KPU, Banwaslu, Government), b) Election Contestants (Political Party, Candidate of DPR, DPD, DPRD, Presidential Candidate and President). Communities as legal subjects (as

voters, Success Team including Community who invited not to exercise their right to vote)

Keywords: The nature purpose of the election, Criminal Election.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi Saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Saya mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua Saya yang telah memberikan curahan semangat, dukungan, dan doa yang tidak terhingga, Bapak Najih dan Bapak Wasis selaku pembimbing skripsi, dan terimakasih juga kepada bapak Fajar Marta selaku ketua KPU Kabupaten Lombok Utara beserta jajarannya, serta tak lupa juga saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pak Itratip yang telah membimbing saya dalam melakukan penelitian di Bawaslu Provinsi NTB atas segala bantuan yang telah diberikan dalam penelitian ini.

Dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman saya yang terus menerus tanpa lelah memberikan dukungan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, Saya menyadari bahwa pembahasan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Saya berterima kasih apabila diberikan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 9 Mei 2020

Gede Teguh M Prayitna



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER / SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL/ GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
SERTIFIKAT PLAGIASI	xiv
INDEKS	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Pendekatan	9
2. Penempatan Lokasi	10
3. Jenis Data/ Refrensi.....	10
4. Sumber Data.....	10
5. Teknik Pengumpulan Data	10

F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu	15
B. Identifikasi Tindak Pidana	17
C. Undang-Undang Mengenai Tindak Pidana Pemilu	18
D. Penegak Hukum Tindak Pidana Pemilu	22
E. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu	31
F. Daluwarsa Penuntutan	38
1. Penuntutan.....	38
2. Mengenai Daluwarsa	42
3. Tujuan Daluwarsa Penuntutan	43
G. Jangka Waktu Penuntutan.....	48
H. Penghitungan Daluwarsa	52
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	61
A. Profil Tempat Penelitian	61
B. Pandanagn Daluwarsa Penuntutan Dalam Pemilu Dan Hasil	62
1. Dasar Pemikiran Daluwarsa Dalam Pemilu	62
2. Tindak Pidana Pemilu Diatur Dalam UU No. 7 Tahun 2017	66
3. Jumlah Data Kecurangan	75
C. Faktor Yang Membuat Kerap Terjadinya Batas Waktu.....	78
1. Kelemahan Dalam Penegak Hukum	78

2. Soal Batas Waktu	80
D. Sistematis/ Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Yang Benar	87
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	100
Tabel 1	2
Gambar 1	27
Gambar 2	30
Gambar 3	31
Gambar 4	32
Gambar 5	33
Gambar 6	33
Gambar 7	34
Gambar 8	35
Gambar 9	61
Gambar 10	90

DAFTAR TABEL/ GAMBAR

Tabel 1. Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Dalam Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2009

Gambar 1. System peradilan pidana terpadu (GAKUMDU)

Gambar 2. Penegakan hukum

Gambar 3. Tahapan penyelesaian tindak pidana pemilu

Gambar 4. Penanganan laporan di bawaslu

Gambar 5. Waktu pelanggaran/ temuan pelanggaran oleh bawaslu

Gambar 6. waktu penyidikan

Gambar 7. Peroses penuntutan tindak pidana pemilu

Gambar 8. Proses persidangan

Gambar 9. Struktur pengurus bawaslu provinsi NTB

Gambar 10. Alur penanganan tindak pidana pemilu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Seminar

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan

Lampiran 3. Surat Tugas

Lampiran 4. Surat penelitian dari kampus

Lampiran 5. Surat selesai penelitian

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Anggraini, Titi. Dkk. *Menata Kembali Pengaturan Pemilu*. Jakarta: Perludem. 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Asshidiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007
- Beccaria, Cesare. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Cet. 1. Yogyakarta:Genta Publishing. 2011.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Chazawi, Drs. Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stetsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Ed.1. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2011
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Celeban Pelajar. 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. ed. 2. cet. ke-7. Jakarta:Sinar Grafika. 2005.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. (Jakarta: Indonesia Printer. 2010)
- Logman, Loebby. *Delik-Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co. 2003.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. ed. 3. Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2006
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- RM, Suharto. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Safitri, Myrna A. Awaludin Marwan. dan Yance Arizona. Ed. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute. 2011.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2011.
- Salman S,Otje. dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat. Mengumpulkan. dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Santoso. Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan. 2009.
- Santoso, Topo. Dkk. *Penegakkan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004. Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Ed.1. Cet. 10. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Metode Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press 2007

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif–Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. 2007

Surbakti, Ramlan. Didik Supriyanto. dan Topo Santoso. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk pembangunan Tata Politik Demokratis*. Cet. 1. Jakarta: Kemitraan. 2008.

Suguitan, Sara Jane A. Ed. *Election Offences*. Philippines: Legal Network For Truthful Elections. 2010.

Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2010.

Tim Peneliti Perludem. *Efektifitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*. Jakarta: Perludem. 2006.

Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. *Ilmu Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

Widnyana, Prof. I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2010.

Yulianto dan Veri Junaidi. *Penyelesaian Hukum Pemilu 2009. Tahapan. Masalah. Dan Rekomendasinya*. Jakarta: KRHN. 2008.

Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut. Dasar Penghapus. Peringan.dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

JURNAL

Ardilafiza. *Akibat Hukum Putusan Pidana (Politik Uang) dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Konstitusi (Agustus 2008). Hal. 30-40.

Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Al’adl, Volume Ix Nomor 3, Desember 2017

Dawson, John P. *Undiscovered Fraud and Statutes of Limitation*. Michigan Law Review. Vol. 31. No. 5 (Mar. 1933).

Davies, P. J. *Limitation of Actions*. The Modern Law Review. Vol. 44. No. 6 (Nov. 1981)

Hadjar, Abdul Fickar. *Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Hukum Pantarei (November 2008). Hal. 22-33.

Haris, *Sketsa Historik Pemilu Nasional dan Pemilu Kepala Daerah dari Masa ke Masa*. Jurnal Konstitusi (November 2008). Hal. 67-82.

L, D. *Displacement of the Doctrine of Laches by Statutes of Limitations: Crystallization of the Equitable Rule*. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register. Vol. 79. No. 3 (Jan.. 1931).

Michigan Law Review. *Statutes of Limitations and Opting out of Class Actions*. Vol. 81. No. 2 (Dec.. 1982).

Nock, R. S. *Extending the Limitation Period*. The Modern Law Review. Vol. 33. No. 3 (May. 1970).

Santoso, Topo. *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu: Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009*. Jakarta: Perludem. 2011.

Sistem Penegakkan Hukum Pemilu. Jurnal Hukum Pantarei (November 2008). Hal. 6-21.

University of Pennsylvania Law Review. *The Statute of Limitations in Criminal Law: A Penetrable Barrier to Prosecution*. Vol. 102. No. 5 (Mar.. 1954).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Adiyaksa. *Analisis Diskresi Kejaksaan Dalam Penuntutan*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003.

Devi Darmawan, Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Telah Daluwarsa, Skripsi Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia 2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemilihan Anggota DPR. DPD dan DPRD.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR.

DPD dan DPRD. Lembaran Negara Tahun 2008 No. 51 Tambahan Lembaga
Negara No. 4836.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden. Lembaran Negara Tahun 2008 No. 176. Tambahan Lembaga
Negara No. 4924.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan

Pengangkatan. Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22. Tambahan Lembaga Negara No. 4480.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 PK/PID/2005 Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 PK/PID/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU/VII/2009



SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Bede Teguh M. Prayitna

Nim : 201610110311076

Dengan Judul Skripsi Pelaksanaan Ketentuan Batas Waktu Pelaksanaan
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembela (Study Kasus Di
Bawaslu Provinsi NTB)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/20/18
10 Agustus 2020



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

INDEKS



Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DCP	: Daftar Calon Pemilih
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gakumdu	: Penegakan Hukum Terpadu
KPK	: Komisi Anti Korupsi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTA	: Kartu Tanda Anggota
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MAPOLDA	: Markas Kepolisian Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
Panwas Pemilu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Parpol	: Partai Politik
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PN	: Pengadilan Negeri

PK	: Peninjauan Kembali
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	: Panitia Pendaftaran Pemilih
PT	: Pengadilan Tinggi
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SP3	: Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
UUD 45	: Undang-Undang Dasar 1945

